



Populisme: Ideologi Mengambang

A. SETYO WIBOWO

Guillaume, Paul dan Francine adalah tiga anak muda Prancis berusia 20-an tahun yang mengantongi gelar master. Saat Pemilu Parlemen Eropa bulan Mei kemarin, mereka semua memilih Partai Hijau (partai ekologis). Mengapa tidak memilih partai *mainstream*: Partai Sosialis (kiri) atau Partai Republikan (kanan)? *Emoh*, kata mereka.

Karya: HARI BUDIONO. Kassian Dephas - Young Woman Massage by Child in Java (Cover), 90x140 cm, acrylic on canvas, 2019



Apakah anak-anak ini populis? Iya dan tidak. Mereka bukan populis dalam arti menyeramkan di Prancis (sebagaimana wacana partai kanan-ekstrem yang dipimpin Marine Le Pen). Tetapi mereka juga bisa disebut populis karena mereka percaya betul pada retorika Partai Hijau (semacam kiri-ekstrem). Jadi, apa sebenarnya populisme itu?

Populisme?

Kata *populisme* banyak dipakai di media, meski tanpa banyak penjelasan. Biasanya *populisme* merujuk pada perkembangan politik terbaru seperti *Brexit* di Inggris, terpilihnya Donald Trump di AS, Viktor Orbán di Hungaria, serta kemenangan Jair Bolsonaro di Brasil. Dari situ, populisme memberi kesan tentang para demagog yang penuh retorika bombastis membujuk rakyat jelata yang capek dengan politik. Kadang, populisme digambarkan sebagai bakteri asing yang meracuni tubuh demokrasi lewat suntikan konsultan politik yang sinis (Steve Bannon di Amerika Serikat) sehingga masyarakat dipecah belah secara emosional.

Laporan *Human Rights Watch* tahun 2018 memberi peringatan: “kita semua harus melawan pendekatan populis yang dekonstruktif”, demokrasi tidak boleh “menyerah di depan populisme”. Barack Obama terang-terangan menyebut populisme sebagai “politik rasa takut, dendam dan jalan pintas” yang akan membawa kita ke rezim otoriter (Peter C. Baker, “‘We the people’: the battle to define populism”, <https://www.theguardian.com/news/2019/jan/10/we-the-people-the-battle-to-define-populism>, Thu 10 Jan 2019 06.00).

Di depan populisme seperti itu, pesannya sederhana: a) sebagai warga negara yang baik kita mesti bertanggung jawab merawat demokrasi dengan cara melawan populisme, supaya lewatnya b) tumbuh antibodi yang membuat demokrasi makin kebal penyakit.

Seiring banyaknya reportase tentang “bahaya populisme”, muncul *backlash* (pukulan balik) yang menganggap populisme sekadar hal enteng yang tak usah dipedulikan. Kita meributkan hal remeh-temeh. Apa betul populisme berbahaya, atau hanya gejala sementara? Jangan-jangan populisme adalah hantu rekaan para politisi *mainstream* untuk melabeli para konstituen yang marah yang gagal mereka layani?

Partai-partai itu sudah tidak *nyambung* lagi dengan kami”, “tidak ada yang baru dan menarik”, “kami ingin sesuatu yang riil, yang visinya menarik dan membuat kami termotivasi untuk terlibat”.

Tiga anak muda itu ada di Cilincing. Meninggalkan kenyamanan dunia pertama, mereka ke kampung kumuh di Jakarta Utara untuk bergabung dengan *Life Project for Youth* (LP4Y). Di kampung itu mereka memberi kursus profesional, melatih anak-anak putus sekolah agar bisa bekerja layak.

Situasi Baru

Terlalu banyak wacana tentang populisme menggelapkan maknanya. Ada banyak debat untuk mendefinisikan populisme. Namun kita mesti kembali ke fakta. Gejala populisme riil, karena kita hidup pada era baru. Banyak pemerintahan gagal memberikan kemakmuran dan rasa keamanan yang nyata pada era *post*-industrial. Masyarakat hidup pada era digital, saling terhubung dan semakin independen. Ideologi politik *mainstream* berguguran. Di Prancis dan Italia, partai kiri mulai hilang dari lanskap politik. Generasi muda di Eropa tidak percaya pada politik *mainstream*. Pemilu parlemen Eropa terakhir membuktikan naiknya parta-partai baru. Kelompok kanan-ekstrem (di bawah Marine Le Pen) mendapatkan rangking pertama, partai baru dari Macron (yang tidak kanan dan tidak kiri) rangking kedua, dan partai hijau menempati posisi ketiga. Partai *mainstream* (partai sosialis dan partai kanan) merosot jauh posisinya di bawah partai-partai baru.

Selain rakyat yang lelah dengan politik yang mereka anggap tidak jelas lagi, kita juga menghadapi generasi milenial (lahir antara 1978-2000) yang mencari pegangan. Anak-anak muda tumbuh dalam iklim yang sama sekali baru, dan merasa tidak terikat pada ideologi kanan atau kiri. Mengikuti penelitian Eric Greenberg dan Karl Weber (“The Millennials: America’s First Post-Ideological, Post-Partisan, and Post-Political Generation”, 09/14/2008 08:59 pm ET Updated May 25, 2011; https://www.huffpost.com/entry/the-millennials-americas_b_126205), generasi milenial adalah generasi baru yang memiliki ciri-ciri berbeda dengan generasi sebelumnya.

Kaum milenial saat ini menjadi bagian terbesar di Amerika (95 juta lebih). Prancis dan Eropa berada dalam situasi yang sama. Generasi ini pintar, terdidik dengan baik, secara sosio-politis sangat independen, terbuka, dan sangat mudah berkolaborasi untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Itu makanya Eric Greenberg dan Karl Weber menjuluki generasi milenial sebagai “*Generation We*”. Di dunia yang makin *interconnected*, generasi “Kita” ini tidak suka bekerja sendirian.

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, *Generation We* ini sangat terlibat dalam politik, cenderung ke kiri (artinya progresif, tidak puas dengan keadaan dan ingin perubahan). Namun mereka tidak mau dikategorikan sebagai kiri, tidak merasa ada ikatan ideologis apa pun dengan yang kanan. Generasi ini mendambakan perubahan tatanan (sosial, politis dan ekonomi). Lebih dari 78% menghendaki ide baru dan inovasi di bidang sosial-politik dan ekonomi. Meski cenderung *enterpreneur* (berusaha

sendiri), generasi ini tidak mengidealkan *cowboy style* atau *hero* soliter, serta menghargai upaya dan kerja bersama. Dalam simpulannya, *Generation We* adalah generasi yang pasca-ideologi dan tidak suka dengan *labelling* partisan seperti kanan (konservatif) atau kiri (liberal). Sangat pantas bahwa keprihatinan mereka tentang demokrasi, HAM, kesejahteraan mondial dan keselamatan planet membuat mereka cenderung ke partai ekologis.

Bila saja analisis ini bisa dikenakan di Indonesia, barangkali kita lantas melihat dengan kaca mata lain, fakta bahwa 23% mahasiswa dan 23% siswa SMA percaya pada Khilafahisme. Menhan Ryamizard Ryacudu menyebut hal itu secara eksplisit pada 20 Juni 2019 (<https://nasional.tempo.co/read/1216442/menhan-sebut-23-persen-pelajar-mahasiswa-setuju-khilafah>). Barangkali anak-anak milenial ini memang memiliki ciri yang sama dengan para milenial lainnya: ingin ide alternatif, politik yang beda, dan tidak mau dikandangkan dalam ideologi (atau partai politik) yang sudah ada, sehingga merasa diri sudah *pasca-Pancasila*.

Keuntungan *Khilafahisme*: ide ini tampak baru sehingga berpotensi menarik, memberikan tawaran sosial-politik-ekonomi yang sama sekali berbeda (dan karena sifatnya sangat ideal dan surgawi, ia memiliki daya tarik luar biasa). Anak-anak muda ini – berbeda dengan diri kita yang cenderung soliter dan *lone-wolf* – suka rela bekerja sama (masuk dalam *liqo*, berkelompok dan bekerja sama mewujudkan mimpi mereka). Bila anak-anak Amerika dan Eropa memimpikan sebuah dunia yang lebih baik, planet yang lebih ramah pada lingkungan, maka anak-anak Khilafah memimpikan sebuah entitas trans-nasional (yang tidak lagi terikat pada Indonesia tetapi memimpikan Khilafah se-planet).

Generasi tahun 1960-an memimpikan Indonesia yang demokratis dan “diperhitungkan di mata dunia”. Kita bangga kalau Indonesia demokratis, ber-HAM, dan Islam memberikan “sumbangan khas” pada masyarakat dunia. Namun saat ini, mimpi 23% kaum milenial tampaknya sudah *post*-Indonesia, atau bahkan *post*-planet karena mereka mendambakan surga kosmis. Bagaimana nasib Indonesia? Sepertinya itu tidak menjadi bagian dari proyek masa depan anak-anak Khilafah.

Bila berkaca bahwa kemandengan ekonomi di Barat masih panjang, dan kita juga sudah berhadapan dengan kaum milenial, maka tahun-tahun ke depan tampaknya akan muncul banyak gejala yang disebut “populisme” (Peter. C. Baker, “We the people’: the battle to define populism”). Dunia Barat mencangkokkan diri pada ekologisisme dan

nativisme, sedangkan di Indonesia mencangkokkan diri pada Agama

Sejauh kita masih berdemokrasi, populisme akan bertumbuh subur. Di Korea Utara, Cina, Arab Saudi atau Laos tidak kita dengar adanya gerakan populis. Gerakan ini hanya muncul di negara demokrasi. Oleh karena itu, menurut Peter C. Baker, kita tidak bisa membahas populisme tanpa menyadari konsep demokrasi yang ada di benak kita sendiri. Ibarat penyakit demam yang membuat menggigil panas dingin, populisme bisa disebut kanker atau masuk angin ringan tergantung dari bagaimana kita memahami demokrasi. Pandangan kita tentang “apa itu demokrasi” menentukan bagaimana kita menyikapi populisme.

Sejarah Istilah

Seturut analisis Cas Mudde, dalam tradisi demokrasi liberal, fenomena populisme tidaklah baru. *People's Party* (di AS) adalah gerakan para petani pada akhir abad ke-19 yang memiliki karakter populis. Pada era pasca PD II, gerakan populis juga muncul dari Prancis, Belanda dan Denmark (tahun 1950-an sampai dengan 1970-an). Gerakan populis ini cenderung bersifat kanan.

Pada tahun 60-an dan 80-an, gerakan populis yang kiri muncul di Eropa. Para mahasiswa militan yang bergerak di tahun 60-an, gerakan *New Left* dan *New Social Movement* berciri populis. Awal-awal gerakan *Partai Hijau* di tahun 1970-an juga memiliki ciri populis: a) mereka menunjukkan diri sebagai anti-*establishment* (anti partai politik), dan b) mengaku diri sebagai representasi sejati suara rakyat secara keseluruhan, merasa diri sebagai wakil resmi rakyat yang bermartabat (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, *Government and Opposition*, Oxford: Blackwell Publishing, 2004, hlm. 548).

Cas Mudde bukanlah orang yang pertama kali menulis tentang populisme. Pada tahun 1990-an, saat memulai risetnya tentang populisme, gerakan ini biasanya dianggap identik dengan “populisme kaum kanan, *Rechtspopulismus*” (bdk. tulisan Margaret Canovan, *Populism*, 1981, dan analisis para intelektual Jerman). Pada tahun itu, populisme dikaitkan dengan Jörg Haider (FPÖ), Jean-Marie Le Pen (*Front National*), Silvio Berlusconi (*Forza Italia*), Pim Fortuyn (*LPF* di Belanda). Semuanya adalah gerakan kanan-radikal. Namun, populisme juga dikaitkan dengan gerakan kiri-radikal: Bernard Tapie (di Prancis), di (bekas) Jerman Timur, Skotlandia dan Belanda. Ernesto Laclau, filsuf kiri kontemporer, bahkan menyatakan sosialisme sebagai “*the highest form of populism*” (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm 549).

“

Sebagai gaya berpolitik, populisme tampak dari retorika yang simplistik, langsung pada rakyat bawah dengan bahasa kasar (*politically incorrect*), dan janji-janji asal menyenangkan rakyat yang tidak realistis.

”

Lebih menarik lagi, populisme bukan hanya ditemukan di kelompok kanan-radikal atau kiri-radikal, tapi juga bisa ditemukan dalam alur politik *mainstream*. Di Amerika, “populisme ras putih” dipakai baik oleh partai kiri (Demokrat) maupun kanan (Republik). Kemenangan atau kekalahan capres Reagan, Clinton, Bush Junior dan Al Gore sedikit banyak dipengaruhi populisme ras kulit putih. Hal serupa terjadi di Inggris (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm 550-551).

Apa yang bisa disimpulkan dari gejala ini? Sejak tahun 1990, harus diakui bahwa populisme telah menjadi fitur yang rutin muncul dalam demokrasi di Barat (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm. 551). Meski populisme lebih banyak ditemukan di kalangan *outsiders* (partai-partai kecil di luar partai tradisional kanan-kiri yang berkuasa), populisme ternyata juga dipakai oleh partai-partai *mainstream*.

Tafsir atas Populisme

Ada tiga pandangan besar tentang populisme: 1) sebuah gaya berpolitik saja, 2) sebetuk gerakan atau organisasi dengan ciri tertentu, 3) sebuah ideologi mengambang, *thin-ideology* (bdk. Ilze Bacere, “What Does Populism Really Mean: A Political Science Perspective”, *The Rise of Populism* (eds. Andis Kudors dan Artis Pabriks), Rīga: University of Latvia Press, 2017, hl. 23). Sebagai gaya berpolitik, populisme tampak dari retorika yang simplistik, langsung pada rakyat bawah dengan bahasa kasar (*politically incorrect*), dan janji-janji asal menyenangkan rakyat yang tidak realistis.

Populisme dengan demikian dianggap *style* komunikasi tertentu saja, yang istilah lainnya dikenal sebagai demagogi



Karya: BAMBANG HERAS, "Bahasa Wajah", 40x40 cm (25 panel), mixed media, 2019.

atau oportunisme. Sebagai bentuk organisasi, populisme dicirikan oleh kepemimpinan langsung sang *leader* kepada *follower*-nya. Sifatnya *top-down*, langsung dan tidak mau *ribet* dengan sistem *check-and-balance* atau profesionalisme modern. Relasi pemimpin dan rakyatnya bersifat langsung dan emosional. Dan sudah ada nama juga untuk gejala seperti ini: kepemimpinan kharismatis atau otoriter.

Cas Mudde dengan tepat melihat bahwa a) wacana politis yang simplistik dan emosional, b) yang menyederhanakan masalah kompleks sebuah demokrasi menjadi sekedar

kepercayaan pada *leader* kharismatik sudah memiliki namanya masing-masing (Cas Mudde, "The Populist Zeitgeist", hlm. 543). Perlu dicari sebuah definisi untuk mengatakan dengan tepat gejala baru bernama populisme ini.

Definisi Populisme

Karena ditemukan dalam berbagai bentuk yang berbeda, dengan topangan ideologis yang bisa saling berkebalikan, populisme jelas tidak koheren dan sulit didefinisikan secara

eksak. Cas Mudde memberikan definisi yang minimalis.

“Saya mendefinisikan populisme sebagai sebuah ideologi (nantinya diperjelas sebagai *thin-centered ideology*, sebuah ideologi mengambang) yang menganggap bahwa masyarakat terbagi secara homogen dan antagonis menjadi dua bagian: rakyat murni *versus* kaum elite yang busuk, dan ideologi ini beranggapan bahwa politik mestinya perwujudan dari *volonté générale* (kehendak umum) rakyat” (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm 543-544).

Populisme bukanlah sebuah ideologi dalam arti yang ketat. Bila kata *ideologi* menggambarkan “gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak” (Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, PT Gramedia, 1991: 366-367), maka populisme hanyalah *thin-ideology*. Kata Inggris *thin* bisa berarti ringan, ramping, langsing, luwes, hampir tidak kelihatan, konsistensinya lemah, tidak padat isinya, melayang, mengambang. Populisme adalah sebuah *ideologi-mengambang* karena ia tidak memiliki dasar yang kokoh.

Kata *mengambang* menurut KBBI bisa berarti 1) mengapung di air, 2) terkatung-katung di udara, 3) tidak tetap/tentu, sehingga saat dikenakan pada politik, *massa mengambang* berarti “tidak masuk satu golongan”. Lewat istilah itu, KBBI menggambarkan bahwa *massa mengambang* sebagai massa yang tidak termasuk di golongan air (karena ia mengapung di atasnya) juga bukan di golongan udara (karena ia hanya menggantung terkatung-katung tanpa pernah menjadi bagian dari udara). Jenis massa ini memang “tidak tentu” karena tidak masuk di golongan mana pun.

Dengan begitu, bila *thin-ideology* diterjemahkan sebagai ideologi mengambang, maka sifat populisme memang tidak tentu (ia bisa di kiri, di kanan, ekstrem kiri dan ekstrem kanan, atau di tengah). Sebagai *thin ideology*, 1) ia tidak kohoren dan tidak konsisten, ia bisa ke kanan, ke kiri, ke tengah, ke mana pun. Dan 2) supaya eksis, populisme membutuhkan *thick ideology*, membutuhkan *hosting*, sebuah inang-ideologi supaya bisa hidup.

Kata *ideologi* menggambarkan sebuah *world view*, teori menyeluruh tentang manusia dan makna hidupnya. Ideologi Liberalisme meletakkan kebebasan individu sebagai yang paling suci, sehingga negara juga hanya hadir secara minimal untuk menjaga kebebasan tersebut. Sebaliknya, *sosialisme* adalah ideologi yang menilai tinggi hidup bersama dan sangat kritis pada praktik-praktik kapitalisme, di mana

negara dianggap bertanggung jawab secara langsung untuk mengusahakan kesetaraan riil warganya.

Populisme bukanlah sebuah ideologi yang ketat, bukan pula ideologi longgar atau terbuka. Sebagai ideologi mengambang, populisme memiliki semacam *world-view*, tetapi tanpa memberikan distingsi yang secara intelektual bisa diargumenkan dengan kokoh. Ia tidak memiliki karakter ideologi (dalam arti positif), tetapi hanya *sok* seperti ideologi, atau istilah umumnya “ideologis”.

Populisme bersifat “ideologis” karena ada “usaha memutlakan gagasan-gagasan tertentu (artinya, di situ ada upaya mengajukan kepentingan-kepentingan tertentu)” (bdk. Franz Magnis Suseno, 1991: 367). Wacana, retorika dan praktik politik populisme di mana-mana cenderung keras, mutlak-mutlakan, dan membuat akal waras buntu.

Aspek “ideologis” populisme tampak dari inti ajarannya yang menurut Cas Mudde: 1) membedakan secara antagonistik (artinya “bertentangan”) dan manikheis (secara moral hitam-putih) antara, di satu sisi, rakyat (yang dianggap suci, murni, korban yang harus dibela), dan, di sisi lain, kaum elite (yang dianggap jahat, korup, berkonspirasi melanggengkan penindasan). Serta mengabaikan kompleksitas demokrasi yang sehat karena 2) menekankan bahwa politik adalah manifestasi langsung *general will of the people*.

Definisi mengambang “rakyat”

Sebagai sebuah *ideologi mengambang*, populisme sangat ideologis saat mengutamakan jargon moral daripada program. Wacana yang diusungnya bersifat moralistik, dilandaskan pada distingsi antara *pure/good people* melawan *corrupted/bad elite*. Namun, bila dikejar ke fakta empiris (atas dasar analisis kelas atau perilaku empiris tertentu), omongan populisme menjadi mengambang.

Cara berpikir populis bersifat *manikhean*, hitam putih, membedakan dengan tegas siapa kawan siapa lawan (seperti “partai Allah” versus “partai Setan”, bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413144201-32290626/amien-rais-dikotomikan-partai-setan-dan-partai-allah>). Kaum populis dengan gampang menggambarkan diri mereka sebagai Malaikat, dan menyetarakan musuh mereka sebagai Setan. Sifatnya yang hitam-putih membuat mereka tidak mau berkompromi, karena segala bentuk kerja sama dengan lawan artinya membiarkan dirinya terkontaminasi oleh kebusukan (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hl. 544).

Meskipun ideologis dan keras, populisme sangat mengambang ketika didesak mendefinisikan siapa “rakyat”

yang ia maksud. Istilah rakyat sama sekali tidak riil, tidak merujuk pada kelas tertentu, atau dalam bahasa Ben Anderson, *imagined community*, sebuah komunitas yang dibayangkan, rakyat-homogen yang penuh keutamaan namun sedang tertindas (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm. 545).

Karena licin dan kabur, setiap tokoh populis memaknai “rakyat” sesuai imajinasinya sendiri-sendiri. Di Inggris, *British Conservatives* merujuk “rakyat” ini pada “Middle England”, sementara *British National Party* (ekstrem kanan) merujuk “rakyat Inggris yang sejati” sebagai “*the native British people*”. Di Indonesia, kubu Prabowo-Sandi menyebut “emak-emak” sebagai gambaran rakyat kecil yang menderita karena daya belinya merosot. Kadang “rakyat” juga merujuk pada “umat yang tertindas”. Kubu nasionalis mendefinisikan rakyat sebagai *wong cilik*.

Meski jargonnya membela rakyat, kaum populis tidak memiliki ambisi revolusioner seperti kaum kiri yang hendak mengubah tatanan sosial. Kaum populis hanya ingin menyadarkan adanya rakyat yang sengsara, namun mereka sama sekali tidak berminat mengubah nilai atau cara hidup rakyat tersebut (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm. 546).

Populisme dan retorika tentang “rakyat” muncul manakala ada kombinasi gejala-gejala seperti: a) kemarahan publik pada politisi yang dianggap tidak becus bekerja, b) padahal situasi sedang buruk dan mengancam gaya/level hidup mereka, c) dan hadirnya alternatif (seorang pemimpin kharismatik yang nampaknya memberi harapan perubahan).

Nativisme dan Agama

Sebagai ideologi mengambang, di Barat, populisme bercokol kokoh di atas ideologi **Nativisme**. Sangat jama kita dengar sekarang jargon “Prancis untuk orang Prancis”, *American First*, atau *Italian First*. Nativisme adalah sebetuk nasionalisme ekstrem (*pribumisme*) yang ditandai oleh *xenophobia* (ketakutan pada orang asing: imigran dan para pengungsi yang agama dan budayanya berbeda). Populisme mencangkokkan dirinya pada inang ideologi bernama Nativisme (yang benci pada orang asing, demi melindungi kaum pribumi) yang di Barat bernama *white supremacy*.

Definisi “rakyat” sebagai korban, di Barat, merujuk pada orang kulit putih yang mapan dan kaya, sementara kaum imigran dan pengungsi yang miskin, sengsara dan bisa mati kapan pun malah dianggap “bukan rakyat”. *White supremacy* adalah sebetuk Nativisme “rakyat”

kulit putih yang superior dan menolak kehadiran “rakyat miskin” (kaum imigran berkulit berwarna). Kaum kulit putih yang dulunya imigran namun telah menjadi “*natives* (pribumi)” merasa diri sebagai “korban” invasi kaum miskin dan pengungsi yang dianggap hanya menghambur-hamburkan pajak yang mereka bayar.

Di Indonesia, jargon “rakyat-pribumi” sebagai korban juga diusung kubu Prabowo-Sandi dan Anies. Meski ada darah Belanda dalam diri Prabowo, ada darah Yaman pada diri Anies, mereka tak segan menyebut diri mereka sebagai “pribumi” yang anti pada Asing dan Aseng (sebutan untuk ras Cina). Anies berpidato tentang pribumi pada 16 Oktober 2018 (<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41648172>) menjelang pesta rakyat setelah ia dilantik sebagai Gubernur DKI. Meski dibantah, Prabowo faktanya berkhutbah tentang “aset yang dikuasai orang asing”, sehingga di medsos pendukungnya menggelontorkan ide “Anti asing dan Aseng” (bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181019202623-32-339965/tim-prabowo-tegaskan-tak-anti-aseng-di-depan-jurnalis-asing>).

Populisme adalah ideologi yang mengambang. Tergantungan pada *leader*-nya, kata rakyat dipahami sesuai inang ideologi yang ditempatinya. “Rakyat yang menjadi korban” bisa jadi malahan kaum kulit putih yang sudah *established* atau umat dari agama mayoritas (bdk. pidato Prabowo tentang umat Islam yang tertindas, <https://www.jpnn.com/news/prabowo-subianto-habib-rizieq-adalah-imam-besar-umat-islam>). Meski sama-sama memakai Nativisme dan Agama, inang ideologi di Barat cenderung Nativisme, sementara di Indonesia cenderung Agama.

Eropa menghadapi dua situasi baru: 1) terorisme (2001), dan akibat dari perang terhadap terorisme (khususnya ISIS) yaitu 2) imigrasi (pengungsi). Masalah imigrasi sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1970-an (tema yang diangkat partai kanan-ekstrem). Namun masuknya pengungsi Suriah ke Eropa, membuat program kanan-ekstrem makin didengarkan. Situasi kelowongan ideologis pasca runtuhnya Tembok Berlin (1990), membuat politik *mainstream* kanan/kiri kehilangan ide.

Politik lantas dibajak oleh emosi-emosi: a) takut pada Islam dan b) takut pada imigran. Mengapa ada ketakutan pada Islam? Karena orang Eropa – setelah proses sekularisasi hebat-hebatan pada 1968 (revolusi Mei) – generasi mudanya saat ini *tidak paham dengan agama*. Bagi mereka, agama itu buruk (negatif) sehingga

cenderung disingkiri. Agama adalah “pemalsuan suara hati dan cara berpikir”, agama adalah “kebencian pada tubuh”, agama adalah “kemunduran (dibandingkan sains)”, agama adalah “kegelapan rasio”.

Orang-orang yang tak-beragama seperti ini paling gampang direkrut masuk dalam cara berpikir yang konyol. Bila mereka nantinya “kembali ke agama” (memeluk agama), maka agama diambil bukan untuk kemanusiaan, melainkan sekadar memenuhi *kebutuhan identitas* (yang sifatnya, dalam bahasa Italia, *identitario* – identitas dalam arti negatif). Dan identitas dalam arti negatif ini dibangun lewat reaksi pada kelompok lain. Di Eropa gerakan ini muncul secara keras di kalangan kaum rasis (yang mengedepankan *Italian First*, atau *French First*). Mereka merasa bahwa kehadiran Islam mengancam *lifestyle* Barat (sikap pada perempuan, soal makanan halal/haram). Atau, secara *soft*, pencarian identitas ini tampak dalam “agama baru” yang ambisinya universal: partai hijau yang menjadi representasi idealisme baru di Eropa.

Mengapa Eropa takut pada imigran? Karena sejak krisis finansial di Eropa (2008) sampai sekarang Eropa belum sembuh. Banyak orang merasa bahwa daya beli mereka menurun, fasilitas pemerintah untuk melayani rakyat berkurang, dan “era disrupsi” (teknologi) membuat mereka cemas dengan kenyamanan perlindungan pekerjaan mereka selama ini. Partai politik kanan dan kiri tidak jelas program sosial ekonominya. Tidak ada perbedaan antara kanan dan kiri. Semua dianggap sama-sama bohongnya. Dan mereka menyimpulkan bahwa akar semua krisis ini adalah hadirnya migran (yang dianggap merebut sumber ekonomi mereka).

Di Indonesia, jargon pribumisme sangat kental dalam kampanye pilpres 2018-2019 sebagaimana ditebar di medsos tentang tenaga kerja dari Cina. Meski datanya sumir, isu ini jelas menysar kaum Cina yang sudah selalu ada di Indonesia. Seperti para imigran di Eropa, kaum Cina di Indonesia mudah dijadikan kambing hitam politik. Naiknya ekonomi Cina di level mondial, masuknya investasi Cina ke berbagai negara lantas digoreng seolah-olah kaum Cina di Indonesia (yang sudah lama berada di sini, yang sudah sepenuhnya pribumi karena lahir dan berbahasa Indonesia) adalah bahaya yang harus disingkirkan. Namun berbeda dengan Barat, jargon pribumisme ditambahi isu Agama.

Khilafahisme adalah gerakan populis yang sangat moralis (membelah dunia menjadi “kami/umat” dan “mereka/kaum kafir”). Gerakan ini aktif membangun

imagined-community kami/rakyat yang tertindas, dengan menebar gambar Palestina atau Rohingya. Mereka rajin menggambarkan betapa umat Islam (yang mayoritas di Indonesia) adalah korban berbagai bentuk kriminalisasi. Dengan mendompleng pada agama Islam, gerakan populis Khilafah berhasil membangun basis kuat di kalangan anak muda dan Aparatur Sipil Negara.

Pada tanggal 20 Juni 2019, “Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengungkapkan sebanyak 23,3 persen mahasiswa di seluruh Tanah Air setuju dengan wacana pendirian negara Islam atau khilafah. Kemudian 23,3 persen siswa SMA setuju dengan hal yang sama. ‘Nah, sekarang sudah mulai Pancasila luntur. Sekarang enggak ada masalah. Tapi, 20-30 tahun lagi, kalau kita biarkan, itu pemimpin bangsa ini mungkin yang kemarin 30 tahun lalu masih mahasiswa, ke depan dia akan jadi Presiden, akan jadi Panglima TNI, atau Kapolri, dia menganut khilafah, selesai bangsa ini. Karena Pancasila tak ada lagi. Selesai Pancasila ini akan terjadi pertumpahan darah. Pasti. Seperti di Timur Tengah. Ini yang tidak kita inginkan dan sangat merisaukan kita,’ kata Ryamizard dalam acara halal bihalal bersama seluruh elemen serta purnawirawan TNI di Gelanggang Olahraga Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019). (...) Ryamizard mengemukakan dalam pengamatan Kemhan, ada 18,1 persen pegawai tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Kemudian 19,4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Data lain adalah 9,1 persen pegawai BUMN yang menyatakan tidak setuju dengan ideologi negara Pancasila dan kurang lebih tiga persen, ada TNI terpengaruh dan tak setuju Pancasila.” (<https://www.beritasatu.com/nasional/560248/ryamizard-234-persen-mahasiswa-setuju-jihad-dirikan-khilafah>)

Populisme memberikan jawaban buruk atas pencarian identitas dengan menawarkan “identitas sempit” (ras atau agama). Jawaban mereka memang buruk, namun harus diakui “gampang diterima, sederhana, mudah diidentifikasi” sehingga meski buruk, jawaban itu dipercaya oleh banyak orang yang resah membutuhkan *solusi* cepat.

Definisi mengambang “elite” - otoriterisme

Dengan mengutamakan “rakyat”, bukan berarti kaum populis otomatis anti pada para ahli (pakar) atau teknokrat. Justru tidak. Bagi mereka, ada elite/busuk,



Karya: BAMBANG HERAS, "Bahasa Wajah", 40x40 cm (25 panel), mixed media, 2019.

ada juga elite-baik, ada intelektual-kacung ada juga intelektual-sejati. Mereka menganggap kaum elite sebagai bagian dari mereka sejauh kaum elite itu memahami kehendak rakyat dan tidak mengkhianati mereka.

Yang membedakan kaum populis dari kelompok-kelompok protes pada umumnya adalah bahwa kaum populis membutuhkan rangsangan dari *leader* populis untuk mulai bergerak. Kaum "rakyat" ini banyak bergantung pada *leader*-nya, yang tentu saja seorang elite!

Para *leader* (semacam Trump, Geertz Wilder, Rodrigo Duterte, Marine Le Pen, Hugo Chaves, Nigel Farage, Boris Johnson, Bernie Sanders) yang mampu membahasakan keresahan rakyat: a) mendefinisikan siapa rakyat (yang tertindas, kalah, tercampakkan), b) siapa musuhnya (yai-

tu kaum elite politik yang korup dan curang), c) mendeklarasikan oposisi "*kami lawan mereka*", d) menekankan bahwa sebagai *leader* ia sendiri adalah bagian dari "rakyat", e) sehingga sebagai "korban", ia akan berjuang bersama rakyat yang tertindas demi perbaikan ke depan. Sebuah f) perjuangan yang tanpa kompromi, manikhean dan bersifat apokaliptik (bak pertempuran akhir zaman).

Para pemimpin populis ini merasa diri inkarnasi langsung kehendak rakyat, sehingga retorikanya cenderung meremehkan tetek-bengek prosedur demokrasi. Tak segan mereka mengibarkan bendera *people power* manakala mereka dalam posisi terdesak (bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190510131122-33-393705/prabowo-people-power-dan-makar>).

Dari ciri gerakan yang dibangun seperti di atas, inang ideologi tempat tumbuhnya populisme adalah kerinduan akan tangan besi, manusia kuat, *leader* sejati titisan *super hero*: otoriterisme.

Otoriterisme

Mengutip Max Weber, Cas Mudde menggambarkan adanya tiga bentuk otoritas: tradisional, legal, dan kharisma. Demokrasi liberal di Barat telah beranjak dari otoritas tradisional ke legal (kompetensi profesional). Populisme yang mengusung “egalitarisme eksekutif” cenderung merendahkan otoritas legal (dan institusi-institusi demokrasi liberal) dan lebih berpaling ke kharisma. Pemimpin populis tentu bukan pemimpin kharismatis, namun ada kesamaan yang mendekatkan keduanya. Kaum populis suka mengidentifikasi diri dengan *silent majority* (rakyat yang bekerja keras, tidak banyak bertanya namun patuh pada aturan negara). *Silent majority* di Barat pelan-pelan marah karena merasa ditipu para politisi, kerja keras mereka dikhianati oleh janji-janji kosong elite politik (atau elite politik yang memprioritaskan imigran daripada rakyat sendiri). *Silent majority* ingin perubahan, namun mereka tidak ingin kekuasaan. Mereka menginginkan perubahan bukan lewat partisipasi lebih banyak dalam demokrasi melainkan lewat *leader* yang di mata mereka lebih mumpuni, lebih tahu masalah yang dihadapi. Mereka ingin *leadership* yang kuat, pemerintahan yang responsif pada *general will*, pemerintah yang *out put*-nya sesuai dengan harapan mereka (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm. 557-558).

“Para pendukung populisme tidak ingin dipimpin oleh ‘orang kebanyakan’ (di Indonesia, ini tampak pada kebencian pada *wong ndeso plonga plongo*, atau *tampang boyolali gak punya duit*)” (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm. 559). Pim Fortuyn di Belanda adalah orang kaya, Silvio Berlusconi dan Donald Trump jelas taipan maha berduit. Dalam bahasa Paul Taggart, “populisme menghendaki orang luar biasa untuk memimpin rakyat biasa” (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm. 560).

Tetapi, bukankah ajaran inti kaum populis adalah sikapnya yang anti terhadap kaum elite yang mereka anggap busuk? Betul, tetapi kaum populis berpikir bahwa meski elite, *leaders* mereka itu adalah “*outsider*-elite” yang justru bisa menjadi “*counter*-elite”. Artinya, *leader* pujaan mereka itu meskipun “*connected to the elites, they are not part of them*”.

Kaum populis percaya bahwa elite yang mereka ikuti (Berlusconi, Trump, atau Prabowo) meskipun elite, jus-

tru *leaders* yang tepat karena dengan segala koneksi-elite yang dimiliki, orang-orang itu bisa memimpin perubahan sesuai dengan kehendak umum rakyat. Dalam arti ini, kaum populis tetap masih dalam alam pikir demokrasi, bahkan tetap percaya pada semacam demokrasi representatif sejauh yang merepresentasikan mereka adalah elite yang cocok dengan kehendak umum mereka.

Trump dan Berlusconi meskipun kaya raya, tidak dipandang sebagai “elite korup” melainkan sebagai “*counter*-elite” yang memiliki klaim moral tinggi karena hendak mewujudkan kehendak rakyat. Mereka selalu berwacana bahwa mereka mewakili *real people, ordinary people, decent people, France d'en bas* (Prancis kelas bawah). Di mata mereka “*people is always right, rakyat selalu benar*”. Bahkan, meski jelas-jelas kaya raya, mereka tak segan menyatakan diri “*Yo soy un pueblo*” (kata Chaves: “saya juga rakyat jelata”).

Hal yang sama terjadi di Indonesia, semua politisi yang mewakili “emek-emak” (Prabowo, Sandiaga Uno, Amien Rais) atau “wong cilik” (entah Megawati atau Suryo Paloh) bukanlah rakyat jelata. Mereka semua jelas kaya raya. Uang semiliar rupiah bagi mereka hanyalah recehan. Rumah mereka, jumlah luasan tanah yang dikuasai, kuda peliharaan, *resort* mewah yang dimiliki, serta jet pribadi adalah simbol-simbol kaum elite.

Sebagai ideologi mengambang, sama seperti definisi “rakyat” yang tidak jelas, maka definisi “elite” pun cenderung licin dan lentur.

Cas Mudde, dalam tulisannya yang terbaru di *The Guardian* (“How Populism Became the Concept that Defines our Age”, 22 Nov 2018) menyatakan, saat menerbitkan “The Populist Zeitgeist” (2000), artikel ini tidak mendapatkan banyak reaksi, ia hanya hanya dikutip 9x (2005), 16 x (2006) dan 28x (2007). Istilah populisme benar-benar menjadi populer pada saat terjadi *Brexit* dan pemilihan Donald Trump sebagai presiden AS. Dari Januari 2015 - November 2018, kata *populisme* makin banyak dicari di *Google search*.

Meski debat tentang populisme masih berjalan, secara umum, saat ini para ahli sepakat bahwa fenomena populisme secara eksklusif memang *lebih ditemukan* di kalangan “*kanan-radikal*”. Inang ideologi yang menghidupi populisme adalah Nativisme (pribumisme *white supremacy*), otoriterisme, dan Agama. Gelombang “populisme kiri” memang ada, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi besar dan berlangsung lama (*Syriza* di Yunani tidak berkembang mengikuti ideologi yang dianggap “kiri”, dan *Podemos* di Spanyol juga makin tidak populis).

Penyebab munculnya populisme

Mengapa populisme muncul? *Pertama*, persepsi bahwa elite politik (dari parpol dominan) dianggap korup. Tentu sejak dulu, para politisi selalu korup, namun hari-hari ini bukti-bukti skandal mereka lebih mudah terpapar dan dilihat sebagian besar rakyat. Globalisasi ekonomi yang memunculkan persepsi bahwa program-program politik kaum elite impoten memperparah pandangan buruk rakyat terhadap mereka.

Kedua, gejala kartelisasi kelas politik makin kuat sehingga para elite politik semakin jauh dari basis (konstituen) mereka. Model koalisi-koalisi antarpol pasca pemilu – yang memang menjadi keharusan – membuat rakyat merasa sia-sia ikut pemilu karena mereka merasa dikhianati suaranya (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm. 552).

Populisme meruyak sejak runtuhnya tembok Berlin (1990), ideologi kanan-kiri di Eropa kehilangan tajinya. Dengan berakhirnya Perang Dingin, demokrasi liberal kehilangan *nemesis*-nya (musuh bebuyutan) yaitu Komunisme. Demokrasi liberal sekarang hanya memiliki rival berat bernama “teori politik idealis”, namun de facto, demokrasi liberal adalah satu-satunya opsi. Dalam situasi tanpa rival, program politik partai kiri dan kanan akhirnya “nyaris sama”, sehingga rakyat bingung dan merasa sia-sia mengikuti pemilu. Janji-janji partai kiri, saat mereka menang pemilu akhirnya tidak ditepati. Demikian juga dengan partai kanan. Akhirnya yang terjadi: partai kiri makin menyerupai proyek kanan, partai kanan juga mengambil alih isu-isu partai kiri. Itu makanya janji-janji bombastis, program politik demagogis, dan khayalan surgawi menyedot imajinasi rakyat. Semakin sebuah teori politik idealis (karena belum ada bukti konkretnya), semakin ia terlihat suci-murni dan diminati

Ketiga, para pemain politik makin kelihatan menjadi “kelas tersendiri” (secara sosiologis mereka pasti berasal dari kelas menengah ke atas; dan secara politis, mereka pasti orang-orang yang moderat dan cenderung menganut asas *political correctness*). Dengan demikian, jarak antara rakyat dan kelas elite politik memang makin jauh. Pada era media sosial seperti sekarang ini, kaum populis melancarkan kampanye persepsi mereka *secara langsung*, berbahasa tanpa tedeng aling-aling untuk memangkas jarak tersebut.

Keempat yang mesti ditelisik adalah peran media dalam membentuk persepsi publik. Biasanya, pada era pasca PD II, di Barat, media ada di bawah kontrol partai

politik, namun munculnya radio dan televisi mengubah perilaku media. Sejak tahun 1960-an, pelan-pelan media bersikap independen terhadap partai politik. Lebih-lebih saat media swasta mulai menggerogoti pangsa pasar media resmi (pemerintah), maka persaingan memperebutkan pemirsa dan pembaca makin keras. Media akhirnya berlomba-lomba mempertontonkan aspek *scandalous* dan ekstrem dunia politik (skandal-skandal korupsi dan pemerintahan diekspos demi menarik perhatian pembaca). Model media yang menjual skandal dan sensasi demi *rating*, akhirnya memperkuat perasaan anti-elite di kalangan pembaca dan pemirsanya. Media seperti ini memberi panggung ideal bagi para *leader* yang mengklaim dirinya populis.

Kaum populis yang mewacanakan kritik sensasional terhadap politik dan pemerintahan mendapatkan panggung ideal lewat media resmi (televisi dan Koran). Saat ini, mediumnya berperilaku seperti itu, audiens-nya juga sudah terbentuk selernya untuk hal-hal sensasional. “Jörg Haider (tokoh ekstrem kanan) membutuhkan media, dan media membutuhkannya” (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm. 554). Dalam peribahasa Jawa, media dan populisme seperti *tumbu oleh tutup* (bakul besar untuk beras menemukan tutupnya; sesuatu yang sulit, namun akhirnya bisa terlaksana: pas dan tepat).

Dalam soal media, di satu sisi, media makin independen dan demi komersialisasi lantas memprioritaskan berita sensasional. Di sisi lain, pemirsa dan pembaca juga makin independen dan cocok dengan tuntutan baru ini. Sejak tahun 1960-an, rakyat makin terdidik dan teremansipasi. Rakyat makin egaliter, akibatnya, karena terdidik dengan baik, rakyat makin independen, makin memiliki tuntutan tinggi terhadap politisi. Rakyat merasa kompeten untuk menilai apakah politisi tertentu bisa dipercaya atau tidak. Rakyat tidak lagi menelan mentah-mentah omongan politisi, dan tidak begitu saja percaya pada pikiran atau ide politisi.

Era media sosial menggabungkan dua gejala di atas: media yang independen dan senang pada sensasi serta pemirsa (rakyat) yang makin kritis dan independen. Dengan media sosial rakyat bisa menjadi pencipta medianya sendiri untuk menggelontorkan opini independennya. Situasi ini menjadi tanah yang sangat cocok bagi bertumbuhnya kaum *leader* populis yang selalu menampakkan dirinya sebagai “*taboo breakers and fighters against political correctness*” (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm. 554).

Bila melihat faktor-faktor di atas, mengingat sebab-sebab munculnya populisme dalam demokrasi liberal bersifat struktural (bukan hanya insidental), maka menurut Cas Mudde, *trend* populisme masih akan lama hidup sebagai roh zaman kita (Cas Mudde, “How Populism Became the Concept that Defines our Age”, hlm. 3).

Populisme: demokrasi non-Liberal

Populisme yang menguat pada awal abad ke-21 muncul dalam konteks demokrasi, dan mengusung sejenis demokrasi yang non-liberal (terjemahan untuk *illiberal*). Demokrasi, secara inti, biasanya dipahami sebagai kedaulatan rakyat dan pemerintahan oleh mayoritas. Di Barat, intuisi demokrasi itu berkembang menjadi demokrasi liberal dengan ciri “perlindungan hak minoritas, *rule of law and separation of powers*”. Namun kaum populis, sambil masih mengakui demokrasi, menyatakan bahwa model demokrasi liberal seperti itu tidaklah universal.

Populisme secara inheren memusuhi ide demokrasi liberal dan lembaga-lembaganya. Secara umum, populisme memusuhi demokrasi konstitusional (yang landasannya adalah *rule of the law* dan pemisahan kekuasaan) Dalam istilah Fareed Zakaria, populisme disebut sebagai *illiberal democracy*. Kaum populis menafsirkan demokrasi sebagai mayoritarisme (siapa mayoritas, dia berhak memerintah, dan tidak peduli dengan nasib minoritas). Namun dalam tataran lain, karena populisme begitu menekankan kehendak mayoritas rakyat secara langsung, maka ia juga bisa disebut sebagai demokrasi ekstrem.

Kita semua tahu bahwa demokrasi liberal dalam praktik konkretnya sebenarnya tak lain adalah semacam “mekanisme kompleks kompromi-kompromi antara, di satu sisi, demokrasi-rakyat dan, di sisi lain, elitisme-liberal”. Di mana-mana, demokrasi liberal dipraktikkan sebagai kompromi tanpa henti antara rakyat (yang memegang kedaulatan) dan oligarki elite (yang defakto menguasai jalur perwakilan-perwakilan institusional demokrasi). Demokrasi sebagai sistem tidak pernah benar-benar langsung mewakili kehendak rakyat. Maka dalam batas-batasnya yang seperti itulah populisme muncul dan menawarkan dirinya sebagai kritik sekaligus solusi atasnya. Dalam istilah Margaret Canovan: “*populism is a biting critique of the democratic limitations within liberal democracies*” (Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, hlm 561). Populisme menafsirkan kehendak rakyat

secara murni, menolak pembatasan elitis atasnya, menginterpretasikan suara mayoritas secara murni (tanpa peduli pada minoritas) dan nyaris tidak peduli dengan soal independensi lembaga-lembaga demokrasi (yang telah tersusun lewat sejarah semisal *trias politica*, dan independensi bank sentral).

Cas Mudde, sejak tahun 2004 mendefinisikan populisme bukan sekadar sebagai retorika simplistik dan emosional (demagogi), bukan pula sekadar oportunistik politik yang bertujuan singkat mendapatkan suara rakyat. Bagi Cas Mudde, meski dijalankan dengan menjijikkan, populisme merupakan sebetuk demokrasi (yang hendak dijalankan secara ekstremis). Menurut Cas Mudde, populisme adalah ideologi mengambang yang intinya adalah: 1) pembagian antagonistik antara “rakyat (baik)” *versus* “elite (busuk)”; dan 2) politik haruslah mewujudkan “kehendak rakyat (yang selama ini dicurangi para politisi)”.

Populisme menjanjikan bahwa mereka akan mewujudkan kehendak rakyat tanpa melalui lembaga-lembaga demokratis yang sudah ada yang dianggap gagal. Jean-Marie Le Pen, pendiri *Front National* mengatakan pada tahun 2007: “Aku akan menyuarakan rakyat, karena dalam demokrasi, rakyat selalu benar, dan siapa pun yang melawan rakyat pasti salah”. Dalam istilah Donald Trump, saat berpidato dalam pelantikannya sebagai Presiden AS: “Kita akan memindahkan kekuasaan dari Washington DC dan mengembalikannya kepada kalian, rakyat! Lembaga-lembaga (demokrasi) selama ini hanya melindungi kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat negara kita” (Peter C. Baker, “‘We the people’: the battle to define populism”).

Kritik Kaum Kiri

Sekelompok akademisi yakin bahwa pendefinisian populisme berbasis “beberapa doktrin inti” secara metodologis *salah*. Di mata mereka, pemberian status “ideologi” pada populisme menjadikan populisme sah sebagai strategi politik yang tentu saja berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Definisi ini seolah mengesahkan populisme sebagai jalan keluar bagi rakyat yang semakin hari merasa bahwa demokrasi hanya melayani segelintir elite dan tidak menjawab keresahan mereka. Kritik ini datang dari kaum kiri yang ingin memelihara roh perlawanan pada *status quo* dan memang merasakan bahwa saat ini politik (dalam arti yang sesungguhnya) belum mampu menjawab secara tepat keresahan konstituen (rakyat).



Karya: BAMBANG HERAS, "Bahasa Wajah", 40x40 cm (25 panel), mixed media, 2019.

Mereka khawatir bila populisme dianggap sebagai ideologi (dengan konotasinya yang negatif, yaitu rasial dan ekstrem kanan), maka muncul efek penyamarataan seolah tiap gerakan apa pun (terutama yang datang dari kiri) yang menantang *establishment* dianggap negatif. Bila populisme yang moralis dianggap sebagai ideologi, mereka khawatir bahwa tiap gerakan kiri yang hendak mengkritisi *status quo* lantas dilabeli sebagai massa yang irasional.

Para kritikus kiri mendapatkan amunisi idenya dari dua filsuf kiri kontemporer Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau (yang memberi landasan pemikiran bagi *Podemos* (Spanyol), *Syriza* (Yunani) dan *La France Insoumise* (Jean-Luc Mélenchon, Prancis)). Ide pokok Mouffe dan Laclau adalah sbb: konflik merupakan inti dari politik itu sendiri, tidak pernah ada konsensus yang bersifat permanen; antagonisme dalam politik bersifat alamiah dan tak terhindarkan sehingga dalam politik selalu akan muncul konflik antara "kami *versus* mereka".

Dengan tekanan pada konflik, maka demokrasi yang diteorikan Mouffe dan Laclau agak berbeda dengan demokrasi liberal (yang cenderung mencari kompromi dan konsensus). Dalam visi mereka tentang demokrasi yang radikal, dua pemikir ini mengatakan bahwa tiap tatanan sosial (demokrasi) adalah *hegemoni*, yang bersifat temporer sehingga selalu akan ditantang oleh tatanan baru yang hendak menggantikannya. Perubahan politik dimulai oleh gerakan yang menantang *status quo*, dan gerakan ini bisa berwajah mirip populisme.

Pada saat tuntutanmu, tuntutanmu dan tuntutan di sekitar berkombinasi menjadi gerakan baru "kita", maka muncullah tatanan baru yang menciptakan sebuah hegemoni baru. Pada gilirannya, hegemoni baru juga mesti siap ditantang oleh gerakan "kita" lainnya lagi yang akan senantiasa muncul.

Dengan kaca mata itu, maka fenomena populisme bisa jadi merupakan ujud *real politics*. Apakah upaya kompromi

yang dilakukan *status quo* saat menghadapi masalah tidak bisa disebut *politics*? Bagi Mouffe dan Laclau, kompromi, “jalan ketiga”, mediasi lewat lembaga-lembaga liberal adalah *non politics*. Jalan kompromi seperti itu cepat atau lambat akan kehilangan pesona, dan rakyat mencari jalan sendiri, dan pada saat itulah *real politics* lantas menunjukkan dirinya.

Tujuan utama *real politics* bukanlah konsensus yang pucat. *Real politics* adalah sebuah “*agonistic pluralism* (pluralisme yang selalu berkompetisi)”: sebuah situasi saat oposisi dan disensus menjadi norma. Mereka yakin bahwa rakyat mampu untuk saling tidak setuju secara mendalam tetapi tanpa men-syaitan-kan pihak lain atau mendeklarasikan perang terhadapnya. Maka bagi Mouffe dan Laclau, masalahnya bukan bagaimana melawan/menghentikan populisme, tetapi “populisme macam apa” yang mesti dijalankan. Dan preferensi mereka jelas: *populisme kiri* adalah solusi yang baik.

Tidak semua akademisi menawarkan *solusi* seradikal Mouffe dan Laclau. Mereka yang mengikuti dua pemikir ini melihat bahaya bahwa rasa panik di depan istilah populisme justru membuat kita menutup mata pada “kemungkinan lain untuk berpolitik”, menutup mata pada adanya tantangan riil dari rakyat terhadap *establishment*. Lebih buruk lagi, ketakutan pada istilah populisme justru membunuh populisme kiri (dan secara ironis bila yang kiri habis, maka terbukalah pintu lebar-lebar bagi populisme kanan).

Kelompok ini tidak ingin bahwa populisme disebut ideologi (pun dalam arti yang mengambang) yang memisahkan yang “baik” dan “buruk”. Status ini membuat orang terbelah dalam pro dan kontra. Para pemikir kiri tidak ingin ada *internal essence* saat membicarakan populisme, sehingga oleh karenanya tidak bisa dinilai sebagai “baik” atau “buruk”. Para akademisi ini cenderung menyebut populisme sebagai *political discourse* belaka (dan bukan *a set of belief*), sekadar wacana politik yang menekankan supremasi kedaulatan rakyat. Ada juga yang menyebutnya sebagai sekedar *political style*.

Timbangan Akhir

Menurut Peter C. Baker, diskusi tentang populisme marak ketika pada akhir ‘80-an dan ‘90-an muncul partai kanan-ekstrem di Eropa (*Austrian Freedom Party, Danish People’s Party, dan French National Front, Lega Nord Padania*). Rakyat mengenal partai-partai kanan-ekstrem tersebut sebagai partai yang mengusung Nativisme dan Rasisme. Partai-partai itu berbicara tentang *real citizens*, tentang etnis murni sebuah negara, dan mereka sangat keras

kepada kaum imigran. Kebanyakan pemimpin partai itu juga secara terbuka bersikap antisemit. Dan tak boleh dilupakan, perolehan suara mereka menanjak seiring dengan beberapa kekerasan rasial yang terjadi di Eropa.

Pada saat itulah beberapa politisi dan jurnalis menyebut gerakan mereka sebagai “populis”. Istilah ini dimunculkan sebagai *alarm* (tanda peringatan) sekaligus *eufemisme* (khas *politically correct*). Istilah ini membantu para wartawan mempertahankan sikap netral di depan fenomena politik. Istilah “populis” tentu bukan pujian, tetapi istilah ini lebih bisa diterima daripada istilah menakutkan “kanan-ekstrem, atau kanan-radikal”. Istilah populis dikenakan untuk menunjukkan “keterbelakangan” gerakan ini: serba emosional seperti anak remaja dan tidak mampu bernegosiasi dalam rezim demokrasi liberal yang kompleks dan intoleran.

Definisi yang ditawarkan Mudde berhasil membongkar beberapa hal: populisme tidak selalu harus kanan-ekstrem, sekaligus memperingatkan kita bahwa gerakan ini berpotensi bergandengan tangan dengan isme-isme lain.

Brexit dan Trump tentu menggunakan retorika populis, namun perilaku mereka tidak didorong oleh “inti populisme” melainkan oleh ideologi lain yang lebih berbahaya: Nativisme. Maka dalam arti ini, kata *populisme* justru menjadi selimut yang buruk karena menutupi barang busuk yang berbahaya.

Definisi Mudde menunjukkan juga bahwa populisme adalah *ancaman* untuk demokrasi liberal. Ini penilaian yang tegas. Demokrasi liberal adalah ide bahwa pemerintah harus menjadi fasilitator bagi hidup bersama yang plural, dalam batas bahwa mereka tidak akan pernah mencapai idealitas keseimbangan antara, di satu sisi, kedaulatan penuh rakyat dan, di sisi lain, lembaga-lembaga hukum yang melindungi hak sipil. Dalam sistem ini, posisi pemerintah tidak bisa begitu saja bisa dijunjukkan oleh suara mayoritas (karena adanya batas-batas hukum). Demokrasi liberal adalah apa yang dengan gampang kita sebut sekarang ini “demokrasi”.

Mengapa populisme dianggap ancaman terhadap demokrasi? Dimensi moralistik dari populisme jelas bertentangan dengan inti demokrasi liberal yang pluralistik. Bila mereka yang mengklaim diri “rakyat murni” dan menganggap “perlindungan terhadap minoritas” adalah tidak perlu, atau bahkan dianggap sebagai “kebohongan elite” untuk mempertahankan dominasinya, bila “rakyat murni” menganggap independensi hakim hanyalah kamuflase elite agar rakyat tidak mendapatkan haknya, maka kita nyata-nyata berhadapan dengan gejala ketika dasar demokrasi justru menjadi bensin bagi membesarnya nyala api populisme.

Tentu saja tidak bisa dibantah, gerakan populis bisa mengungkapkan kritik valid kepada *status quo*, pada dominasi elite politik yang seringkali memang jauh dari sikap demokratis. Namun pertanyaan yang valid membutuhkan jawaban yang baik. Di mata Cas Mudde, populisme adalah “jawaban demokratis yang non-liberal (*illiberal*) terhadap liberalisme yang dilihat tidak demokratis”. Populisme mengajukan pertanyaan yang tepat, tetapi menyodorkan jawaban yang salah.

Kaum kiri tidak sepakat dengan pembicaraan populisme yang seperti itu (dianggap berbahaya), karena istilah populis tak lain adalah hinaan. Di mata kaum kiri, yang kita sebut kaum populis sebenarnya hanya “tamu mabuk yang datang pada acara makan malam demokrasi, yang tidak peduli pada tata cara makan dan sopan santun, dan malah teriak-teriak tentang si A atau si B yang munafik – padahal semua orang sepakat untuk tidak membicarakan hal seperti itu di sebuah resepsi makan malam.” Populisme bagi mereka tidak berbahaya, hanya kegenitan yang kalau digeneralisasi malah memperlemah hal-hal baru yang selalu muncul dalam demokrasi.

Dua posisi ini bisa berbantahan tanpa habis: populisme adalah bahaya versus populisme hanyalah gaya tanpa esensi yang dan tak perlu ditakuti. Namun yang tak boleh dilupakan, keduanya ini sebenarnya bersepakat satu hal: mereka sama-sama berbicara tentang fenomena yang menggejala di politik kontemporer saat ini.

Obat apa yang tepat untuk populisme? Menurut Mudde, untuk menjawab populisme, tidak cukup bergerak melakukan hal yang sifatnya anti-populis. Lebih dari itu, harus ada upaya untuk kembali ke “politik yang ideologis”. Artinya, para pembela demokrasi mesti *menciptakan ulang* secara ideologis siapa “kita” supaya dengan demikian bisa melindungi institusi-institusi demokrasi liberal dan prosedur-prosedurnya. Seradikal apa pun posisi Mouffe, perlu diingat bahwa, pada tahun 2017 ia menulis demikian: “Pada tahun 1985 kami mengatakan perlunya meradikalkan demokrasi, sekarang (2017), *we first need to restore democracy*, kita mesti merestorasi demokrasi, sehingga nantinya bisa diradikalkan. Tugas ini (merestorasi demokrasi) jauh lebih sulit.”

Media *framing* untuk isu populisme menjadi jelas: populisme adalah gejala inheren dalam demokrasi, populisme menemukan celah antara “janji demokrasi” dan “ketidakmungkinan merealisasi janji itu sepenuhnya secara permanen”. Soal populisme akan selalu muncul, dan reaksi kita tergantung visi kita tentang demokrasi.

Bila kita sadar bahwa demokrasi adalah sebuah jalan panjang, petualangan penuh *surprise*, yang tak pernah ideal, kita tidak akan takut. Populisme adalah bagian dari dinamika demokrasi itu sendiri, yang meski berbahaya, tetapi bisa dihadapi dan justru akan membuat kita makin yakin untuk melakukan re-ideologisasi agar demokrasi makin kuat. Seperti kuman yang membuat demam, tetapi lantas merangsang pembentukan antibodi, populisme bisa menjadi *challenge* demokrasi untuk makin kuat.

Namun bila demokrasi dibayangkan sebagai “*fixed idea* tentang surga yang harus terealisasi di dunia”, maka bisa jadi “celah-populisme” membuat kita: a) yang kecewa pada kegagalan demokrasi (karena tak bisa menurunkan surga) lantas menjadi girang dan menaruh harapan pada populisme untuk mendatangkan surga itu. Populisme tidak dipandang sebagai penyakit dan ancaman, populisme justru dianggap sebagai obat dan *solusi* untuk kegagalan demokrasi. Populisme menjadi cara baru mendapatkan kekuasaan yang retorikanya adalah mendatangkan “surga”.

Atau, b) bagi kita yang terlalu optimis pada demokrasi dan menganggapnya seperti “agama” lantas mati-matian menentang dan men-”syaitan”-kan populisme dan menganjurkan tindakan-tindakan keras untuk menghilangkan sel kanker bernama populisme, pada gilirannya, tindakan ini kalau tidak hati-hati justru bisa membunuh demokrasi juga.

Dalam bingkai itu, tawaran solusi praksis (bukan teoretis) untuk Indonesia – untuk menghadapi *populisme gerakan Khilafah* yang mendompleng di inang ideologi kuat bernama Agama - adalah: menguatkan institusi dan praktik demokrasi, menguatkan praktik budaya Pancasila yang tampak dalam penegakan HAM dan pembelaan kaum minoritas, menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi terhadap nilai yang membentuk identitas ke-kitaan sebagai bangsa (misalnya, budaya lokal), dan secara praktis memilih dan memilah elite birokrasi (terutama di Kemdikbud dan Kemristekdikti) yang sepakat dengan ke-kita-an sebagai bangsa (Pancasila). ●

Dr. A. Setyo Wibowo,
dosen STF Driyarkata, Jakarta

Red.: Naskah ini pernah dipresentasikan pada Diklat *Kompas* - Jakarta, tanggal 25 Juni 2019.